

**BAB I****PENDAHULUAN****I.1. Latar Belakang Masalah**

Pada masa globalisasi saat ini hubungan atau interaksi yang melintasi antar bangsa dan Negara tidak lagi terbatas oleh wilayah. Beberapa negara di Asia yang sebelumnya berbasis industri ringan seperti tekstil dan lainnya telah menjadi negara industri baru negara, tersebut antara lain Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan China. Kebijakan negara-negara tersebut mendorong terjadinya industrialisasi yang kemudian di rumuskan dalam rencana jangka panjang menuju target industri nya.

Negara-negara industri baru di Asia pemerintah nya mempunyai kebijakan industrialisasi yang berbeda-beda. Pertama Taiwan, sejak pemerintah setempat menjalin kerjasama dengan AS dengan mengundang Tim gabungan dari Taiwan dan yang terdiri atas insinyur dari Bell Labs, IBM, dan beberapa universitas untuk membentuk Tim penasihat teknis. Pemerintah Taiwan akhirnya menyetujui membangun industri komponen komputer dengan mendirikan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Sekarang Taiwan sukses sebagai negara industri komponen komputer, dan komputer jadi. Acer Corp adalah perusahaan komputer yang kita kenal produk nya di Indonesia. Di Taiwan, UMKM yang berorientasi ekspor memegang peranan penting dalam perekonomian.



Kemudian ada Singapura, pemerintah nya mempunyai dedikasi yang tinggi untuk membantu masuknya investasi MNC dan menjadikan nya sebagai negara yang paling menarik untuk berinvestasi di kawasan Asia. Industri di Singapura terbangun oleh besarnya pengaruh investasi MNC dari Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jepang.

Ketiga ada Korea Selatan yang saat ini tidak hanya teknologi saja yang mempengaruhi negara luar tapi juga budaya nya. Perubahan negara Korsel dari negara agrarian menjadi negara industri dinilai cukup baik dan pesat. Hal ini terjadi karena Kebijakan industri nya dikenal dengan *export first*, yaitu mengarahkan industri nya untuk orientasi ekspor. Dengan kebijakan nya tersebut Korea Selatan sekarang telah mempunyai perusahaan-perusahaan besar seperti di sektor produk elektronik ada Samsung, LG dan sektor otomotif yaitu Hyundai, Daewoo, dan KIA.

Keempat ada negara tirai bambu Cina yang mulai membuka diri terhadap dunia luar sejak tahun 1976. Dan pada tahun 1986, Kementerian Sains dan Teknologi membuat tujuh kunci sektor teknologi tinggi yaitu IT, bioteknologi, otomasi, energi, material baru, dan dua di bidang militer untuk dilakukan akselerasi industrialisasi.

Industrialisasi dapat terwujud dengan adanya perkembangan teknologi yang lebih maju dan modern yang dapat memberikan pengaruh efisiensi dan efektifitas kepada pekerjaan yang dikerjakan. Percepatan perkembangan teknologi suatu negara berkembang dapat didukung lewat investasi langsung multinational corporation (MNC) maupun joint venture (JV). Namun tidak hanya itu saja tapi pemerintah dalam menerapkan strategi pembangunan juga harus



mengimplementasikan nya secara terarah, penuh komitmen, dan dilakukan berkelanjutan serta mengurangi hambatan-hambatan yang nantinya akan mengecilkan minat para investor.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah lokal harus mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing nasional. Sejak era reformasi tahun 1998 memang terjadi banyak perubahan dalam kebijakan industrialisasi. Pembangunan ekonomi semula yang ditekankan pada pertumbuhan industri besar berpindah ke pada ekonomi kerakyatan. Dalam menghadapi persaingan ketat di pasar dalam negeri maupun ekspor diperlukan pembangunan industri yang memiliki keunggulan kompetitif baik dalam peningkatan mutu atau kualitas dan juga layanan produk lewat kemampuan menggunakan teknologi sebagai pendukung, peningkatan produktifitas secara efisien, serta adanya spesialisasi kerja.

Di Indonesia dilihat dari aspek pembangunan masalah dari negara Indonesia adalah tentang jumlah penduduk yang sangat besar dan tidak tersebar secara merata kemudian mengakibatkan menjadikan masalah lain soal lapangan pekerjaan dan kurangnya kebutuhan pokok, sarana dan prasarana di beberapa wilayah di Indonesia.

Peran wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah usaha nya dalam menyejahterakan masyarakat nya. Meskipun dalam proses pembangunan seluruh masyarakat juga harus ikut membantu berlangsung nya pembangunan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian

“Menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajaran nya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosial-politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peranan



yang besar terutama di bidang ekonomi. Para teoretisi dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsinya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini (*opinion leader*) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial. Bahkan “rakyat jelata” pun harus ikut dilibatkan. Singkatnya, pembangunan merupakan “urusan” semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai “penonton”, semua harus berperan sebagai “pemain”.<sup>1</sup>

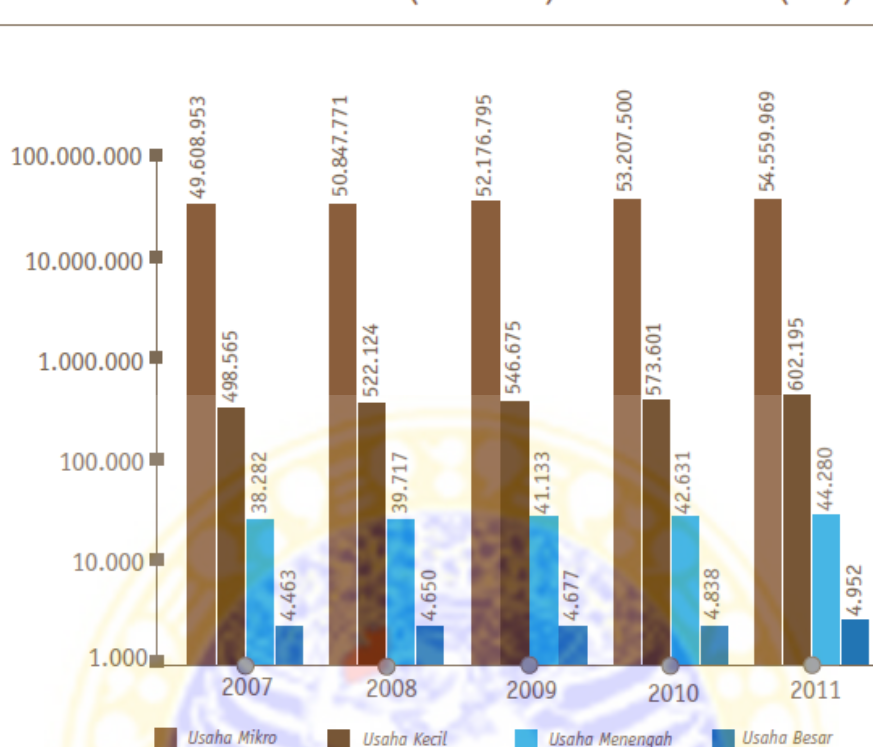
Sebagai negara berkembang Indonesia di prediksi terkena dampak krisis ekonomi global namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini biasa terjadi karena Indonesia tidak menggantungkan perekonomiannya sepenuhnya kepada perekonomian internasional tetapi terdapat indikator ekonomi domestic salah satunya berupa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di tiap penjuru provinsi Indonesia.

Salah satu sektor ekonomi Indonesia yang tidak berdampak secara langsung oleh krisis ekonomi global adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga perekonomian Indonesia masih bisa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. UMKM di Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah pelaku usahanya dari tahun ke tahun sebagai contoh dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 2,57% pelaku usahanya.

Berikut gambar perkembangan pelaku usaha UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan UB (usaha besar) dari tahun 2007 sampai 2011.

---

<sup>1</sup>Siagian, S. P. (2007). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.


**JUMLAH PELAKU USAHA NASIONAL (UMKM + UB) TAHUN 2007–2011 (UNIT)**


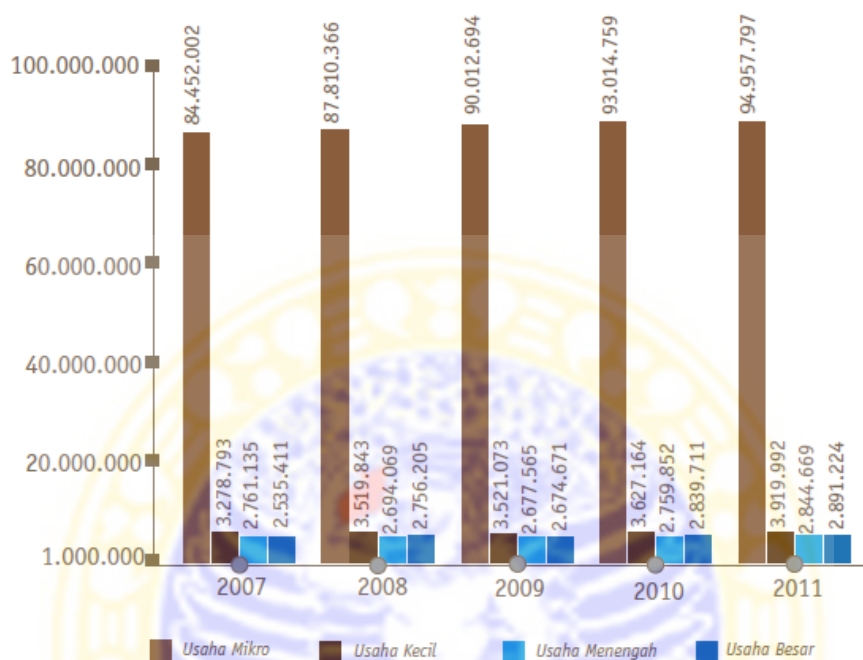
Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah UMKM terdapat peningkatan sebesar 2,57 % dari 53.823.732 unit pada tahun 2010 menjadi 55.206.444 unit pada tahun 2011.

Sumber: Biro Pusat Statistik

**Gambar 1 Jumlah Pelaku Usaha Nasional (UMKM+UB) tahun 2007-2011 (unit)**

Selain menunjukkan tentang perkembangan jumlah pelaku usaha nasional dari data gambar 1.1 tersebut dapat juga disimpulkan bahwa usaha mikro dan kecil merupakan jenis usaha yang paling banyak ada di Indonesia. Karena penduduk Indonesia paling dominan dalam usaha mikro maka UMKM merupakan Usaha yang paling banyak dalam menyerap tenaga kerja di tingkat domestik.

Berikut ini data laporan tahunan 2011 yang diperoleh dari situs resmi kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah tentang jumlah penyerapan tenaga kerja (UMKM+UB) tahun 2007-2011.


**JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA (UMKM + UB) TAHUN 2007–2011 (ORANG)**


Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat **peningkatan** sebesar **2,33%** dari 99.401.775 orang pada tahun 2010 menjadi 101.722.458 orang pada tahun 2011.

Sumber: Biro Pusat Statistik

**Gambar 2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (UMKM+UB) tahun 2007-2011 (orang)**

Usaha mikro merupakan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja karena usaha mikro banyak membutuhkan peran manusia sebagai tenaga dalam usaha nya dan masyarakat dapat menjalankan wirausaha jenis ini tanpa memerlukan modal yang besar. Dengan bertambah nya jumlah usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, maka tingkat pengangguran terbuka di Indonesia jumlahnya juga menurun. Itu berarti krisis global yang terjadi di barat



## **BAB I: Pendahuluan**

---

tidak mempengaruhi sektor perekonomian domestic di Indonesia khususnya UMKM. Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) keadaan tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran.





**Tabel 1.1 Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan Utama, 2011-2013 (juta orang)**

*\*) Sejak tahun 2011 menggunakan penimbang penduduk berdasarkan hasil SP2010*

Jenis Kegiatan Utama	2011*)		2012		2013
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
<b>1. Angkatan Kerja</b>	<b>119,40</b>	<b>117,37</b>	<b>120,41</b>	<b>118,05</b>	<b>121,19</b>
Bekerja	111,28	109,67	112,80	110,81	114,02
<b>Penganggur terbuka</b>	<b>8,12</b>	<b>7,70</b>	<b>7,61</b>	<b>7,24</b>	<b>7,17</b>
<b>2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b>	<b>69,96</b>	<b>68,34</b>	<b>69,6</b>	<b>67,88</b>	<b>69,21</b>
<b>3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>6,80</b>	<b>6,56</b>	<b>6,32</b>	<b>6,14</b>	<b>5,92</b>
<b>4. Pekerja tidak penuh</b>	<b>34,19</b>	<b>34,59</b>	<b>35,55</b>	<b>34,29</b>	<b>35,71</b>
Setengah Penganggur	15,73	13,52	14,87	12,77	13,56
Paruh Waktu	18,46	21,06	20,68	21,52	22,15





Berdasarkan tabel 1.1 tentang pengelompokan Indonesia usia diatas 15 tahun menurut jenis kegiatan utamanya dari tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja Indonesia pada Agustus tahun 2012 sebanyak 118,1 juta orang memang bertambah 3,1 juta orang menjadi 121,2 juta orang pada Februari 2013 tapi jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia juga mengalami pertambahan dari 110,8 juta orang pada Agustus 2012 menjadi 114,0 juta orang atau mengalami pertambahan sebanyak 3,2 juta orang. Dan pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 7,24 juta orang pada Agustus 2012 menjadi 7,14 juta orang pada Februari 2013 atau mengalami penurunan sebanyak 400.000 orang.

Yang termasuk dalam kelompok pengangguran adalah yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sebab punya pekerjaan tetapi belum dimulai. Jumlah pengangguran yang menurun salah satunya juga dipengaruhi oleh meningkatnya pertambahan UMKM yang kemudian menciptakan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak.

Perkembangan perekonomian domestic khususnya perkembangan UMKM dapat dilihat melalui data yang di peroleh dari badan pusat statistic tentang perkembangan UMKM di Indonesia, berikut data termuat dalam tabel 1.2



Tabel 1.2 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2011 *)		TAHUN 2012 *)		PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)
1	<b>UNIT USAHA (A+B)</b>	<b>(Unit)</b>	<b>55.211.396</b>		<b>56.539.560</b>		<b>1.328.163</b>	<b>2,41</b>
	<i>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	<i>(Unit)</i>	<i>55.206.444</i>	<i>99,99</i>	<i>56.534.592</i>	<i>99,99</i>	<i>1.328.147</i>	<i>2,41</i>
	• Usaha Mikro (UMi)	<i>(Unit)</i>	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38
	• Usaha Kecil (UK)	<i>(Unit)</i>	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52
	• Usaha Menengah (UM)	<i>(Unit)</i>	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
	<i>B. Usaha Besar (UB)</i>	<i>(Unit)</i>	4.952	0,01	4.968	0,01	16	0,32
2	<b>TENAGA KERJA (A+B)</b>	<b>(Orang)</b>	<b>104.613.681</b>		<b>110.808.154</b>		<b>6.194.473</b>	<b>5,92</b>
	<i>C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	<i>(Orang)</i>	<i>101.722.458</i>	<i>97,24</i>	<i>107.657.509</i>	<i>97,16</i>	<i>5.935.051</i>	<i>5,83</i>
	• Usaha Mikro (UMi)	<i>(Orang)</i>	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	4.901.720	5,16
	• Usaha Kecil (UK)	<i>(Orang)</i>	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	615.977	15,71
	• Usaha Menengah (UM)	<i>(Orang)</i>	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	417.354	14,67
	<i>Usaha Besar (UB)</i>	<i>(Orang)</i>	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	259.422	8,97

Keterangan:

\*) Angka Sangat Sementara

\*) Angka Prediksi

Sumber Data: Kementerian Koperasi dan UMKM (diolah)



Berdasarkan Tabel 1.2 pada halaman 9 yang memuat tentang perkembangan Unit Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Usaha Besar menunjukkan bahwa perkembangan UMKM dalam dua tahun terakhir (2011-2012) jumlah unit keseluruhannya menunjukkan perkembangan sebesar 2,41% atau bertambah 1.328.163 unit UMKM. Hal ini menunjukkan perkembangan perekonomian domestik Indonesia tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi global yang banyak terjadi di barat.

Dengan bertambahnya unit UMKM yang ditunjukkan oleh data Tabel dan gambar yang telah disajikan sebelumnya maka lapangan pekerjaan juga semakin bertambah, dan akibat yang ditimbulkannya terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka di masyarakat. Seperti berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di barat dimana terjadi krisis ekonomi yang berakibat bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia jumlah pengangguran terbuka tidak bertambah tetapi menjadi berkurang.

Selain mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja Indonesia Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga telah dianjurkan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Di beberapa negara berkembang seperti di Indonesia sektor usaha mikro kecil dan menengah hampir dipastikan menjadi kegiatan ekonomi yang cukup besar pengaruhnya dalam jumlah dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Hal itu bias dibuktikan saat pasca krisis tahun 1998 di Indonesia dimana usaha besar mengalami keterpurukan sedangkan UMKM semakin bertambah jumlahnya tiap tahun sampai sekarang. Meskipun dalam ukuran memberikan sumbangan terhadap



PDB belum cukup besar, namun di sektor ini UMKM mampu menjadi salah satu tumpuan dari stabilitas ekonomi nasional. Upaya masyarakat dalam mengelola usaha kecil menunjukkan pertumbuhan secara kuantitatif dalam jumlah pelaku usaha nya yang tentu saja jumlah tersebut menunjukkan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Selain mengatasi permasalahan pengangguran, UMKM memberikan sumbangan besar terhadap komposisi PDB (Pendapatan Domestik Bruto).

Menurut data BPS tahun 2011-2012 perkembangan PDB atas dasar harga berlaku dari sektor UMKM meningkat 565.995 milyar atau meningkat sebesar 13% sedangkan untuk usaha besar menunjukkan peningkatan sebesar 248.781 milyar atau meningkat 7,96%.

Pemerintah secara nasional telah membuat berbagai macam strategi dengan merealisasikan suatu bentuk undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha nya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan untuk mengatasi masalah nya.

Jawa Timur, punya modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yaitu petarung ekonomi dan UMKM yang hebat. Ini juga yang menjadi dasar pertimbangan untuk perluasan dan penguatan. Perluasan struktur industri di Jawa Timur Akan dikuatkan melalui UMKM dan koperasi.



Hal itu tidak lepas dari peranan pemerintah kabupaten/kota yang terus mendorong pendirian koperasi. Hasilnya, kontribusi koperasi dan UMKM dalam PDRB Jawa Timur cukup fantastis. Di Propinsi Jawa Timur mulai tahun 2010 telah ada beberapa kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan mempunyai stabilitas inflasi yang baik. Hal ini didukung karena adanya minat investasi yang tinggi dari investor lokal maupun asing karena dinilai kabupaten tersebut telah berkembang infrastruktur dan perdagangannya. Dan kabupaten di Jawa Timur tersebut antara lain adalah Mojokerto, Tuban, dan Gresik.

Kemajuan pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh para eksportir. Karenanya pemerintah propinsi, kabupaten dan kota akan terus bersinergi dengan para pengusaha industri dan perdagangan untuk meningkatkan kerjasama. Hal ini tidak lain merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah UMKM unggulan yang sudah mampu menembus pasar ekspor dapat dilihat di tabel 1.3 tentang Keragaan UMKM dan UKM Unggulan



Tabel 1.3 Keragaan UMKM dan UKM Unggulan Per 30 September 2014

No	Kab / Kota	Ukm Perintis Ekspor	Ukm Pelaku Ekspor
1	Kota Surabaya	45	35
2	Bangkalan	26	20
3	Banyuwangi	47	7
4	Blitar	56	3
5	Bojonegoro	51	1
6	Bondowoso	34	5
7	Gresik	50	9
8	Jember	35	17
9	Jombang	46	3
10	Kediri	50	18
11	Lamongan	47	8
12	Lumajang	54	1
13	Madiun	48	1
14	Magetan	50	4
15	Malang	27	31
16	Mojokerto	53	3
17	Nganjuk	32	3
18	Ngawi	29	17
19	Pacitan	49	-
20	Pamekasan	43	-
21	Pasuruan	15	8
22	Ponorogo	12	1
23	Probolinggo	22	1
24	Sampang	50	9
25	Sidoarjo	40	
26	Situbondo	33	16
27	Sumenep	49	-
28	Trenggalek	14	1
29	Tuban	23	2
30	Tulungagung	48	12
31	Kota Batu	37	13
32	Kota Blitar	20	4
33	Kota Kediri	15	-
34	Kota Madiun	38	-
35	Kota Malang	43	9
36	Kota Mojokerto	6	2
37	Kota Pasuruan	39	11
38	Kota Probolinggo	12	3
	<b>Total</b>	<b>1.388</b>	<b>283</b>

Sumber Data : Keragaan UMKM - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur



Selain dilihat dari banyaknya jumlah UMKM yang telah mampu menjadi pelaku usaha eksportir. Keseriusan propinsi Jawa Timur dalam mengelola usaha mikro kecil dan menengah terlihat dalam banyaknya jumlah sentra UMKM. Hal ini dapat dilihat di tabel 1.4 tentang sentra binaan BDS.





Tabel 1.4 Rekapitulasi Sentra Binaan BDS Per 30 September 2014

NO	KAB / KOTA	JUMLAH SENTRA	JUMLAH BINAAN BDS (SENTRA)	KOMODITAS UNGGULAN
1	Kota Surabaya	16	1	Olahan hasil laut
2	Bangkalan	5	2	Batik Tulis dan Kerajinan Daun
3	Banyuwangi	24	1	Anyaman Bambu
4	Blitar	3	1	Gula Kelapa
5	Bojonegoro	9	1	Kerajinan Limbah Akar Jati
6	Bondowoso	27	1	Bordir
7	Gresik	106	1	Anyaman Bambu
8	Jember	22	1	Genteng
9	Jombang	6	1	Manik-Manik
10	Kediri	14	1	Genteng
11	Lamongan	8	1	Telur Asin
12	Lumajang	4	1	Kerajinan Perak
13	Madiun	14	1	Brem
14	Magetan	6	1	Batik Tulis
15	Malang	28	1	Keripik Ubi
16	Mojokerto	11	1	Sepatu
17	Nganjuk	10	1	Shuttlecock
18	Ngawi	3	1	Tas
19	Pacitan	16	1	Batik Tulis
20	Pamekasan	15	1	Batik Tulis
21	Pasuruan	12	1	ATBM Keset
22	Ponorogo	8	1	Emping
23	Probolinggo	25	1	Mangga
24	Sampang	13	1	Batik Tulis
25	Sidoarjo	17	2	Tas
26	Situbondo	11	1	Bordir
27	Sumenep	22	1	Ukir Kayu
28	Trenggalek	12	1	Tahu dan Tempe
29	Tuban	33	1	Krupuk Ikan
30	Tulungagung	34	1	Ikan Hias
31	Kota Batu	13	2	Susu dan Jamur
32	Kota Blitar	11	1	Wajik, Opak, Kue Kering
33	Kota Kediri	2	1	Tenun
34	Kota Madiun	6	1	Sambal Pecel dan Krupuk
35	Kota Malang	18	1	Bordir
36	Kota Mojokerto	3	1	Miniatur Kapal
37	Kota Pasuruan	3	1	Cor Logam
38	Kota Probolinggo	7	1	Krupuk Ikan
	<b>TOTAL</b>	<b>597</b>	<b>41</b>	

Sumber Data : Keragaan UMKM - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur





Perkembangan tiap-tiap kabupaten berbeda-beda tergantung minat para investor yang mau menanamkan modal di kabupaten tersebut. Wilayah yang mempunyai jalur akses penghubung baik darat maupun laut yang mudah menjadi bahan pertimbangan para investor. Kemudian tersedianya banyak tenaga kerja produktif dan terampil juga menjadi faktor pendukung. Kabupaten yang dinilai cukup menyediakan sumber daya tersebut adalah Gresik. Faktor Pendorong lainnya Kabupaten Gresik mengalami peningkatan minat investor adalah karena letaknya yang strategis sebagai pengembangan industri di Surabaya yang dinilai mulai padat dan jenuh meskipun ada juga Kabupaten Sidoarjo yang ada di sekitar Surabaya namun beberapa tahun belakangan mulai terkendala musibah Lumpur Lapindo. Sementara untuk Madura budaya masyarakat dan beberapa bentuk perizinan susah diperoleh.

Pengalaman Kabupaten Gresik dalam mengelola kegiatan industri besar memang sudah lama baik sejak puluhan tahun yang lalu atau pada saat dibangunnya industri Semen Gresik dan Petrokimia. Bahkan nama baiknya dalam mengelola industri tidak hanya di dalam negeri tapi juga internasional. Pemerintah kabupaten Gresik berupaya menggerakkan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun menuju ke arah positif karena diharapkan dengan banyaknya industri pengolahan akan mendorong timbulnya industri baru yang saling menunjang dan selain nantinya industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja industri tersebut juga akan mempengaruhi sektor-sektor lain untuk tumbuh dan berkembang.

Pada tahun 2013 perkembangan industri terjadi cukup pesat baik dalam industri besar, kecil atau sedang. Kawasan Industri di Kabupaten Gresik cakupan



wilayah nya sangat luas dan terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam table

1.5 tentang Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) di tahun 2013

**Tabel 1.5 Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) tahun 2013**

Bulan	Perumahan		Industri		Jasa		Permukiman	
	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)
Januari	1	4,00	7	7,65	10	1,64	35	4,79
Februari	5	4,37	3	1,24	16	6,68	19	3,55
Maret	2	1,72	8	64,18	29	38,09	35	3,97
April	3	9,56	10	6,85	33	29,48	38	5,05
Mei	11	6,75	7	5,61	30	11,32	29	5,58
Juni	1	0,47	5	3,29	23	13,09	67	10,77
Juli	5	2,98	13	8,92	25	9,34	60	9,29
Agustus	1	0,96	1	0,12	13	8,51	31	3,61
September	1	2,83	18	33,27	18	5,60	35	5,64
Oktober	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
November	9	3,40	5	2,51	26	7,89	61	7,71
Desember	5	8,23	4	4,17	37	18,79	67	11,76
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>45,26</b>	<b>81</b>	<b>137,80</b>	<b>260</b>	<b>150,44</b>	<b>477</b>	<b>71,72</b>

*Sumber Data : Gresik Dalam Angka 2013 – BPS Kabupaten Gresik*

Di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 tercatat sebanyak 166 industri besar dan 346 industri sedang. Industri besar terbanyak terdapat di kecamatan Driyorejo sedangkan industry sedang terdapat di Kecamatan Cerme. Sektor Industri dibedakan atas industri kecil rumah tangga serta industry menengah dan besar adalah industry dengan nilai investasi diatas satu milyar rupiah. Sedangkan



industry kecil/rumah tangga yang mengajukan ijin TDK dengan investasi di bawah 5 juta rupiah, Industri kecil yang mengajukan ijin TDI dengan investasi Rp 5 juta hingga Rp 200 juta serta industry kecil yang mengajukan ijin IUT dengan investasi Rp 200 juta hingga 1 Rp 1 milyar. Dalam perdagangan jumlah penerbitan surat ijin usaha (SIUP) di kabupaten Gresik selama tahun 2012, sebanyak 1.030, SIUP yang diterbitkan paling banyak untuk pedagang kecil sejumlah 753 (73.11%), pedagang menengah sejumlah 185 (17.96%) dan untuk pedagang besar sebanyak 52 (5,05%).<sup>2</sup>

Dalam laporan Jumlah Penerbitan Surat Ijin Industri yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik terlihat dari tahun 2010 sampai 2012 ada penambahan baik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan dalam laporan Tanda Daftar Perusahaan juga terdapat penambahan jumlah di perorangan, CV, PT dan Koperasi. Hal ini dapat dilihat di tabel 1.6 tentang Jumlah Penertiban Surat Ijin Industri dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tahun 2008-2012

---

<sup>2</sup> Gresik, B. P. (2013). *Gresik Dalam Angka 2013*. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.



**Tabel 1.6 Jumlah Penerbitan Surat Ijin Industri dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2008-2012**

Jenis Surat Ijin		Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SIUP					
	1) Mikro	0	0	0	0	40
	2) Kecil	708	693	628	738	753
	3) Menengah	105	113	138	166	185
	4) Besar	53	34	65	69	52
2	TDP					
	a. Perorangan	566	487	477	429	595
	b. CV	277	315	432	330	552
	c. PT	116	116	169	272	389
	d. Koperasi	11	4	10	20	23
	e. Bentuk Usaha Lainnya	0	0	0	3	0

*Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Kabupaten Gresik*

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyiapkan rencana tata ruang dan tata wilayah dengan memperluas kawasan industri ke Kecamatan Manyar yang telah tertuang dalam rencana tata ruang dan tata wilayah jangka panjang 2010-2030. Sementara untuk kawasan pemukiman dan perumahan akan ada lahan seluas 10 ribu hektar di wilayah selatan kabupaten Gresik.

Kawasan yang selama ini menjadi areal produksi perikanan budidaya tambak serta produksi tambak garam selama bertahun-tahun yang berada di kecamatan Manyar hingga Ujung Pangkah mulai beralih untuk pengembangan bisnis. Karena sebelumnya pengembangan bisnis hanya berkutat di wilayah kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom.



Dengan perubahan peruntukan itu, lahan di jalur pantai utara (pantura) tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan para investor, karena kawasan tersebut dinilai sangat potensial untuk industri. Dan dengan diikuti membaiknya infrastruktur penting seperti jalan raya. Wilayah Utara yang memang hendak dijadikan kawasan industri adalah termasuk industri ringan yang tidak menimbulkan dampak besar

**Tabel 1.7 Jumlah Industri Besar dan Sedang Tahun 2012**

NO	Kecamatan	Industri		
		Besar	Sedang	Jumlah
1	Wringinanom	15	12	27
2	Driyorejo	46	43	89
3	Kedamean	1	3	4
4	Menganti	20	27	47
5	Cerme	8	120	128
6	Benjeng	1	23	24
7	Balongpanggung	2	3	5
8	Duduksampeyan	-	5	5
9	Kebomas	42	41	83
10	Gresik	6	8	14
11	Manyar	20	16	36
12	Bungah	2	9	11
13	Sidayu	1	14	15
14	Dukun	-	11	11
15	Panceng	-	8	8
16	Ujungpangkah	2	2	4
17	Sangkapura	-	1	1
18	Tambak	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>166</b>	<b>346</b>	<b>512</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*



Perkembangan industri di Gresik memang tidak bisa dibendung. Perkembangan yang massif ini harus bisa diminimalisir dampak sosial yang pasti akan terjadi. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini terabaikan harus mulai dibuat planing pemberdayaan yang terencana dan terukur. Polusi Kota yang berada di ambang batas wajar kesehatan harus menjadi prioritas agar Gresik menjadi Kota industri yang manusiawi.

Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Beberapa industri di Gresik antara lain Semen Gresik, Petrokimia Gresik, Nippon Paint, BHS-Tex, Industri perkayuan/ Plywood dan Maspion. Gresik juga merupakan penghasil perikanan yang cukup signifikan, baik perikanan laut, tambak, maupun perikanan darat. Gresik juga terdapat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 2.200 MW. Antara Gresik dan Surabaya dihubungkan oleh sebuah Jalan Tol Surabaya-Manyar, yang terhubung dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol. Selain itu perekonomian masyarakat Gresik banyak ditopang dari sektor wiraswasta. Salah satunya yaitu Industri Songkok, Pengrajin Tas, Pengrajin Perhiasan Emas & Perak, Industri Garment (konveksi). Di utara kota Gresik juga tepatnya di kota Sedayu merupakan penghasil sarang burung walet terbesar di Indonesia

Ada beberapa perusahaan besar di Gresik yang menjalin kerjasama dengan UMKM dalam bentuk Kemitraan salah satunya adalah PT Semen Gresik. Pada tahun 2011 PT Semen Gresik menyerahkan bantuan untuk usaha bagi masyarakat sekitar pabrik Tuban senilai Rp 4 milyar. Bantuan tersebut adalah merupakan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi warga sekitar pabrik Semen Gresik. bantuan tersebut sengaja dikucurkan di Kabupaten Tuban lantaran wilayah Tuban



merupakan lokasi dari Pabrik PT Semen Gresik. Sedangkan pada tahun 2012 Sekitar Rp 164 miliar yang diambil dari laba bersih PT Semen Gresik (Persero) Tbk. terserap untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan Semen Gresik.

Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk, menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penggantian nama tersebut, sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya Strategic Holding Group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional. Saat ini kapasitas terpasang Semen Indonesia sebesar 29 juta ton semen per tahun, dan menguasai sekitar 42% pangsa pasar semen domestik. Semen Indonesia memiliki anak perusahaan PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa dan Thang Long Cement.<sup>3</sup> Pada tahun 2013 ini telah mempunyai kurang lebih sekitar 12.000 mitra binaan dengan omset-sekitar Rp. 800 milyar dari berbagai bidang usaha mulai dari perdagangan, kuliner, agribisnis, industry kreatif, hingga berbagai sector industry kecil lainnya. Mitra binaan tersebut tersebar di berbagai daerah, terutama di basis usaha perseroan, yaitu di Gresik dan Tuban.

PKBL PT Semen Indonesia yang didalamnya terdapat program Kemitraan utamanya adalah agar bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, dan supaya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima nya

---

<sup>3</sup>*Profil Perusahaan PT Semen Indonesia (Tbk)*. (n.d.). Retrieved 5 14, 2014, from PT Semen Indonesia (Tbk): <http://www.semenindonesia.com/page/get/profil-perusahaan-9>



Dari berbagai kegiatan dari program kemitraan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia telah menunjukkan membawa pengaruh penting terhadap penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

- Jumlah mitra binaan meningkat 31,9% dari 18.027 unit menjadi 23.352 unit
- Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh mitra binaan meningkat 25,3% dari 28.439 orang menjadi 35.634 orang
- Pendapatan mitra binaan naik 46% dari Rp1,07 triliun menjadi Rp 1,57 triliun.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengelola UMKM terlihat setelah Kepala Dinas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Mokhammad Najikh, pada tahun 2012 berkunjung ke beberapa negara Asia dan terkesan dengan penataan Sentra UMKM salah satunya di Taipei, Taiwan.

Menurut Mokhammad Najikh yang ikut dalam kunjungan dengan Bupati Gresik ke Taiwan dan Korea Selatan bersama rombongan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa hampir seluruh UMKM di Taiwan ter sentra di bawah tanah. Karena tanah di Taiwan yang tidak terlalu luas dan menyebabkan harga tanah di Taiwan begitu sangat tinggi yang dapat mencapai Rp. 1 milyar per m<sup>2</sup> di perkotaan.

Selain ingin menata UMKM sesuai yang didapat di Taiwan dan di Korea Selatan, Najikh juga ingin menularkan Gaya hidup masyarakat Taiwan dan Korea selatan yang hemat Energi. “Mereka sangat efisien dalam memenej energi dan dan penggunaan sumber daya alam. Misalnya dalam penggunaan air. Masyarakat Taiwan hampir tidak pernah mencuci motor karena ongkos mencuci yang mahal”.





Katanya. Disana, setiap mobil yang berusia 10 tahun dikembalikan ke Pemerintah dan diganti dengan mobil baru hanya dengan membayar 7%. Tambah Najikh.<sup>4</sup>

Di negara-negara yang telah lebih maju seperti Korea Selatan, Jepang dan Taiwan dan sebagainya telah cukup memberikan rangsangan ke arah kemitraan yang berjalan sesuai dengan kaidah ekonomi yang berorientasi pasar. Usaha kemitraan cukup berhasil karena usaha nya terutama didorong oleh adanya kebutuhan dari pihak-pihak yang bermitra itu sendiri, atau diprakarsai oleh dunia usaha nya sendiri sehingga kemitraan dapat berlangsung secara alamiah. Sebagai suatu strategi pengembangan usaha kecil, kemitraan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara di Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, China, dan sebagainya. Pola kemitraan sub kontrak yang memberikan peran kepada industri kecil dan menengah sebagai pemasok bahan baku dan komponen industri besar banyak diterapkan di negara-negara tersebut.

Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan demikian, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap, dan perilaku dari para pelaku yang menjalankan kemitraan tersebut. Disamping itu,

---

<sup>4</sup> PDTI. (2012, Juli). *INGIN MENATA UKM SEPerti DI TAIPEI*. Retrieved from Diskoperindag Kabupaten Gresik: <http://gresikkab.go.id/diskoperindag/18072012/ingin-menata-ukm-seperti-di-taipei.html>



ada banyak prasyarat dalam melakukan kemitraan usaha antara UMKM dan UB, diantaranya adalah harus adanya komitmen yang kuat diantara pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan usaha memerlukan adanya kesiapan yang akan bermitra, terutama pada pihak UMKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan sebagai mitra yang handal. Pembinaan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pematangan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan, sehingga kemitraan usaha dapat dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Galuh Kartika tahun 2012 berjudul peran dinas perindustrian dan perdagangan dan PT Semen Gresik dalam pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kewenangan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sepenuhnya adalah peran pemerintah daerah dalam penerapannya dunia usaha juga ikut berperan dalam pengembangan UMKM di kabupaten Lamongan melalui pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan atau CSR

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mahfi Sri Wulandari yang berjudul Kemitraan antara pemerintah, *Civil Society* dan Sektor Privat dalam Implementasi peraturan daerah No 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan terbatas merokok (KTM) di kota Surabaya, menunjukkan bahwa kemitraan dalam implementasi perda KTR dan KTM di kota Surabaya ini terdiri dari dua bentuk kemitraan yaitu kemitraan dalam bentuk penyediaan layanan sarana fisik dan non fisik.



Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral, sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berjalan tidaknya kemitraan usaha, dalam hal ini antara UMKM dan usaha besar, tergantung pada kesetaraan nilai-nilai, moral, sikap, dan perilaku dari para pelaku kemitraan. Atau dengan perkataan lain, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesetaraan budaya organisasi.

Oleh sebab itu, demi mewujudkan kemajuan suatu kemitraan antara usaha kecil mikro menengah dengan usaha besar di Indonesia sendiri, maka makalah skripsi ini dibuat agar dapat memberi kejelasan secara pasti mengenai kemitraan usaha agar dapat diterapkan secara nyata dan konkret.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas dirumuskan adalah Bagaimana Pola Kemitraan yang terjalin antara Usaha Besar PT Semen Indonesia dengan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Gresik?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang muncul dari fenomena dan kemudian dijadikan obyek penelitian. Dan berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan



skripsi ini, tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah Untuk mengetahui Pola Kemitraan yang terjalin antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Gresik.

#### **I.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai (value), baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai :

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan informasi dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan mengulas permasalahan atau topik yang sama.
  - b. Menambah wawasan bagi penulis dalam memahami dampak pembangunan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat.
2. Kontribusi Praktis
  1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan pengembangan UMKM agar dapat berkelanjutan.
  2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat dan sebagai bahan perbandingan serta dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

#### **I.5. Tinjauan Pustaka**



Dalam tinjauan pustaka ini berbagai teori akan dibahas agar dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun teori yang akan dibahas meliputi tentang Kemitraan, serta pengertian Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Teori menurut Kerlinger (1965:11) dalam James A. Black dan J Champion (1992:48) berarti adalah sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan detail yang saling terkait dan berhubungan diantara beberapa variabel, dengan masuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori terdiri dari beberapa variabel atau bagian, definisi, dan dalil yang saling berakaitan kemudian menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, yang bertujuan menjelaskan fenomena ilmiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran "pemikiran teoritis" yang mereka definisikan sebagai "menentukan" bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori tentang kemitraan.

### **I.5.1. Kemitraan**

#### **I.5.1.1. Pengertian Kemitraan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan dan kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>6</sup> Namun untuk menambah dan memperkaya pemahaman

---

<sup>5</sup>Creswell, J. W. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.

<sup>6</sup> Depdikbud, T. P. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



mengenai kemitraan, maka akan dipaparkan beberapa pengertian kemitraan menurut para ahli diantaranya adalah

1. Ian Linton

Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>7</sup>

2. Dr. Muhammad Jafar Hafsah

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.<sup>8</sup>

3. Keint L. Fletcher

*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit*

Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.

4. Henry R. Cheeseman

*“Voluntary Association of two or more person for carrying on a business co-owner for profit. The formation of a partnership creates certain right and duties among partners and with third parties. These right and duties are established in the partnership agreement and by law”.*

(Kemitraan atau yang dikenal dengan istilah persekutuan adalah asosiasi secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-

<sup>7</sup> Linton, I. (1997). *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta: Hailarang.

<sup>8</sup> Hafsah, M. J. (1999). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



bentuk Kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian Kemitraan ataupun ditentukan oleh Undang-undang).<sup>9</sup>

#### 5. Anoraga

Kemitraan merupakan suatu bentuk jalinan kerjasama dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. Terjadinya kemitraan adalah bila ada keinginan yang sama untuk saling mendukung dan saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan bersama.<sup>10</sup> Kemitraan usaha ini dilakukan antara usaha kecil dengan sektor usaha besar. Dengan adanya kemitraan ini, usaha kecil diharapkan dapat hidup berdampingan dan sejajar dengan usaha besar.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian kemitraan menunjukkan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerja sama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerja sama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya.

Edward J. Blakely menguraikan *Public-Private-Partnerships* : “*No matter what organizational structure is selected, public agencies and private firms have to enter into new relationships to make the development process work. This approach is much more than the public sector merely offering cooperation to the private sector to facilitate economic activities for private gain; it is far more than occasional meetings between the municipal council and local business organizations, such as the chamber of commerce. Although these activities are important, and perhaps integral to good business/government relations, they do not constitute true partnerships among the sectors. Partnerships are shared*

<sup>9</sup> Ibrahim, J. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

<sup>10</sup> Anoraga. (2001). *Manajemen Bisnis*. Malang: Rineka Cipta.



*commitments to pursue common economic objectives jointly determined by public, private, and community sectors and instituted as joint actions.*<sup>11</sup>

Apapun struktur organisasi yang dipilih, lembaga-lembaga publik dan perusahaan swasta harus masuk ke dalam hubungan baru untuk membuat suatu pekerjaan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini jauh lebih baik daripada sektor publik hanya menawarkan kerjasama kepada sektor swasta untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi untuk kepentingan pribadi; itu jauh lebih dari pertemuan sesekali antara dewan kota dan organisasi bisnis lokal, seperti kamar dagang. Meskipun kegiatan ini penting, dan mungkin integral hubungan bisnis / pemerintahan yang baik, mereka tidak merupakan kemitraan sejati antara sektor-sektor. Suatu kemitraan yang berkomitmen untuk mengejar tujuan ekonomi umum bersama-sama ditentukan oleh publik, swasta, dan masyarakat sektor bersama dan disatukan sebagai aksi bersama.

Pola kemitraan adalah salah satu konsep yang sudah banyak dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu lembaga mampu berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah arus mampu mencerminkan keikutsertaan para anggotanya (*participatory approach*) dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Dari pengalaman yang lalu, keikutsertaan sektor swasta dan wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin oleh wakil dari swasta

<sup>11</sup> Blakely, E. J. (1994). *Planning Local Economic Development Theory and Practice*. Sage Publications, Inc.





atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”, para anggota akan lebih untuk mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi ganjalan dalam membangun daerahnya. Banyak pengamat menunjukkan bahwa kecenderungan didunia usaha sekarang bukan kepada membangun usaha yang semakin besar, tapi kepada unit usaha kecil atau menengah dan independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar akan terdiri bukan atas peningkatan permintaan yang besar, melainkan atas peluang-peluang kecil.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dengan demikian kemitraan adalah suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non-material. Nilai tambah ini akan berkembang terus sesuai dengan meningkatnya tuntutan untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya, nilai tambah yang didapat merupakan fungsi dari kebutuhan yang ingin dicapai.



Kemitraan berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau kepemilikan nya, yang meliputi BUMN, badan usaha swasta, dan koperasi; maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Selain aspek pelaku, dalam aspek objek nya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi

Setelah dipaparkan berbagai definisi dari para ahli mengenai kemitraan, selanjutnya akan dilihat definisi menurut peraturan perundang-undangan. Sesuai UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat 8, “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Sedangkan Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

### **I.5.1.2. Syarat-Syarat Kemitraan**

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, dan karena kemitraan bukanlah proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai,



melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1.2.1 Kerjasama**

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

#### **1.5.1.2.2 Kesetaraan**

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada



kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

#### **1.5.1.2.3 Saling memberi kontribusi**

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh di dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

#### **1.5.1.2.4 Saling Bersinergi**

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga



ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan.

Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra. Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan pada saling memperkuat.

#### **1.5.1.2.5 Saling menguntungkan**

Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disini lah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

#### **I.5.1.3. Tujuan Kemitraan**

Julius Bobo menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling*



*Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.<sup>12</sup>

Kemitraan baik dalam skala usaha kecil maupun skala usaha besar pada akhirnya tidak hanya sekedar memberi keuntungan pada pihak yang bekerja sama, tetapi pula akan berdampak pada pihak-pihak lain atau masyarakat secara umum konkritnya kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan secara Mikro
  - a. Meningkatkan pendapatan dan skala usaha pihak yang bekerja sama
  - b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pihak yang bekerja sama
- 2) Tujuan Secara Makro
  - a. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha
  - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara
  - c. Memperluas kesempatan kerja
  - d. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Tujuan-tujuan diatas akan dapat dicapai, bila kerja sama tersebut berjalan awet karena tidak jarang terjadi kesepakatan kerjasama berakhir tanpa tujuan dikarenakan perpecahan atau perselisihan pihak-pihak yang bekerja sama. Kelanggengan kerja sama yang hanya dapat dicapai, bila kedua pihak komitmen atau mentaati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama.

<sup>12</sup> Bobo, J. (2003). *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

**I.5.1.4. Bentuk-bentuk pola kemitraan**

Kemitraan dilakukan melalui berbagai rangkaian proses yang diawali dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai pada menuju target yang ingin dicapai. Pola kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dan usaha besar di Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu :

## 1. Inti Plasma

Yaitu merupakan hubungan kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Usaha besar dalam hal ini mempunyai tanggung jawab sosial untuk membina dan mengembangkan UMKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

## 2. Subkontrak

Merupakan hubungan kemitraan antara UMKM dengan Usaha besar, yang didalam UMKM yang bermitra tersebut memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Menurut Soewito, pola subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku subkontraktor untuk



mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk.<sup>13</sup>

Namun tidak hanya itu saja usaha besar dalam hal ini juga memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan.

### 3. Dagang Umum

Adalah hubungan kemitraan UMKM dengan Usaha besar, yang di dalamnya usaha besar tersebut memasarkan hasil produksi UMKM atau UMKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha besar sebagai mitranya. Dalam pola ini usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari UMKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha besar.

### 4. Keagenan

Keagenan disini adanya hubungan kemitraan antara UMKM dan usaha besar, yang di dalam kerjasama tersebut UMKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar yang bertindak sebagai mitranya.

Menurut Munir Fuady, pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak principal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.<sup>14</sup>

### 5. Waralaba.

Pola kelima yaitu waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek

<sup>13</sup> Soewito. (12 Desember 1992). Pengembangan Industri Kecil. *Suara Merdeka*.

<sup>14</sup> Fuady, M. (1997). *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bakti.





dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UMKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

### **I.5.2. Pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah**

#### **I.5.2.1. Pengertian dan Ciri-ciri Usaha mikro kecil dan menengah**

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Ciri-ciri usaha mikro

- Jenis barang/komoditi usaha nya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- Tempat usaha nya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- Sumber daya manusianya (pengusaha nya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank;



- Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

- Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuan nya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
- Tidak sensitive terhadap suku bunga;
- Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
- Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

#### 1 Ciri-ciri usaha kecil



- Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
- Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengah

- Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;



- Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Usaha Kecil Menengah yang setelah Undang-undang RI No. 19 Tahun 1995 diamandemen pada tahun 2008 menjadi Usaha mikro kecil dan menengah adalah merupakan sebuah produk ekonomi domestik yang diperlukan langkah strategis untuk menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. Peningkatan baik dari kapasitas maupun perannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar menumbuhkan perekonomian nasional (*pro growth*), meningkatkan jumlah wirausahawan dan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran (*pro job*), serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang lebih baik dan layak (*pro poor*). Usaha mikro kecil dan menengah saat ini seperti diatur menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 pengertian dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha tersebut adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria



2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Untuk penggolongan suatu usaha tersebut tergolong dalam usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 juga dijelaskan kriterianya sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:



- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Untuk usaha besar kriterianya adalah omzet per tahunnya lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan Assetnya lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

#### **I.5.2.2. Jenis-jenis Usaha mikro kecil dan menengah**

Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UMKM di Indonesia untuk menghasilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut adalah:

##### *a. Usaha kecil menengah Manufaktur (Manufacturing Business)*

Yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya



b. Usaha kecil menengah Dagang (Merchandising Business)

Adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.

c. Usaha kecil menengah Jasa (Service Business)

Yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging atau yang lainnya.

### **I.5.3. Permasalahan UMKM**

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain meliputi:

A. Faktor Internal

- 1) Kurangnya Permodalan dan Terbatas nya Akses Pembiayaan  
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi



UMKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UMKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.[16]

- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.





- 3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar  
Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.
- 4) Mentalitas Pengusaha UMKM Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UMKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UMKM itu sendiri.[17] Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UMKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UMKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.
- 5) Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UMKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada



pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

## B. Faktor Eksternal

- 1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi).[19] Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan



yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UMKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

- 2) Terbatas nya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha nya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usaha nya yang disebabkan karena mahal nya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.
- 3) Pungutan Liar Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap Minggu atau setiap bulan.
- 4) Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlaku nya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian



diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

- 5) Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UMKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.



- 6) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UMKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.
- 7) Terbatas nya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.
- 8) Terbatas nya Akses Informasi Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minim nya informasi yang diketahui oleh UMKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampu nya produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.



### **I.6. Definisi Konsep**

Dalam penelitian ini konsep yang perlu didefinisikan adalah:

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

kemitraan merupakan sebuah konsep ekonomi karena menguntungkan semua pihak yang bermitra, dan bukan konsep sosial atau kedermawanan. Kemitraan jelas menguntungkan yang kecil, karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, kewirausahaan, dan manajemen yang dikuasai oleh usaha besar. Tetapi, kemitraan juga menguntungkan bagi yang besar karena dapat memberikan fleksibilitas dan kelincahan. Kemitraan juga dapat meningkatkan daya saing baik bagi usaha besar maupun usaha kecil. Dengan kemitraan bisa dikendalikan gejala monopoli, tetapi tetap diperoleh efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra

### **I.7. Metode Penelitian**

Dari berbagai macam penelitian setiap penelitian mempunyai berbagai macam tujuan dan kegunaan tertentu namun secara umumnya penelitian bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian tersebut sebelumnya belum pernah diketahui atau temuan baru, pembuktian berarti data yang diperoleh tersebut digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi tertentu dan pengembangan berarti untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam yang sudah ada.



Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya menganggap fenomena sosial yang melibatkan manusia (subjek) sebagai pelaku aktivitas sosial, dan senantiasa melibatkan interpretasi, kesadaran, dan makna subjektif ditingkat individu sang manusia sebagai tindakan sosial.

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>15</sup>

Alasan peneliti memakai metode kualitatif adalah sifat masalah yang diteliti, dimana penelitian ini memahami sesuatu dibalik fenomena tertentu. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran Dinas perdagangan perindustrian dan koperasi dalam pengembangan UMKM dan program kemitraan antara usaha besar dan UMKM di Kabupaten Gresik

Adapun metode kualitatif dalam penelitian ini lebih melakukan cara pendeskripsian secara verbal dan bukan melalui angka-angka, seandainya pun ada angka-angka dalam penelitian ini tidak akan berpengaruh dalam analisis.

---

<sup>15</sup> Moleong, L. (2000). *metodologi penelitian kualitatif*. bandung: remaja rosdakarya.



### **I.7.1. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan data-data yang menjadi fokus penelitian khususnya yang berkaitan dengan pola Kemitraan dalam pengembangan UMKM di kabupaten Gresik

Oleh karena itu yang menjadi fokus penelitian adalah:

Program Kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dalam pengembangan UMKM di kabupaten Gresik

1. Bentuk Model Kemitraan antara kedua pelaku usaha
2. Manfaat yang telah diperoleh kedua belah pihak

### **I.7.2. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan tujuan awal penelitian diharapkan melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami yang berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan kemudian menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau mengatasi masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah yang terjadi dapat dengan mudah dicari solusi terbaiknya.

Dengan demikian maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan berusaha untuk melukiskan segala bentuk kejadian yang ada dilapangan. data kualitatif yang diperoleh merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif peneliti dapat memahami alur peristiwa secara bertahap kemudian menilai sebab-akibat





dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat atau membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya.

Penelitian yang bersifat deskriptif dapat memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Meskipun ada kalanya penelitian demikian bertolak dari beberapa hipotesa tertentu, namun ada kalanya tidak. Arah penelitiannya sering pada awalnya dibantu oleh adanya hasil penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, yang akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama.

Dalam hal penelitian semacam ini masalahnya sudah terang, akan tetapi langkah yang terpenting adalah penegasan dari konsep-konsep relevan (Koentjaraningrat, 1983).

Selanjutnya, berdasarkan penertian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang peran Dinas perdagangan perindustrian dan koperasi dalam pengembangan UMKM dan program kemitraan antara usaha besar dan UMKM di Kabupaten Gresik

### **I.7.3. Lokasi Penelitian**

Pemilihan terbaik dalam pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan *Purposive* atau bertujuan dengan mempertimbangkan teori substantif, dan terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini yang



menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gresik propinsi Jawa Timur.

Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah:

1. Usaha Besar (Badan Usaha Milik Negara) yang dalam penelitian ini adalah PT. Semen Indonesia (persero) Tbk.
2. Pelaku usaha UMKM
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi

#### **I.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Sebuah Penelitian tidak bisa terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dari penelitian. Namun Kualitas data yang baik tergantung kepada kualitas alat pengukur atau alat pengambil data serta kualifikasi peneliti. Data atau informasi dapat diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang sebelumnya telah ada dan dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Peneliti harus menerima menurut apa adanya.

Pencarian data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian karena dari data tersebut data nantinya akan diinterpretasikan dan dianalisis. Menurut Lofland dan Lofland, "sumber data utama dalam penelitian



kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambalan seperti dokumen, dan lain.”<sup>16</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara yaitu : wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dilakukan untuk memperdalam, mangklarifikasi maupun menguji temuan data yang diberikan oleh informan kepada peneliti.

### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan tentang kejadian yang oleh peneliti tidak dapat diamati sendiri secara langsung. Teknik ini juga mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka serta untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang cara berlaku yang sudah menjadi kebiasaan, hal-hal yang dipercayai dan nilai-nilai yang dianut. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

### 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini terdapat data yang berupa gambar-gambar, foto-foto, dan berbagai dokumen-dokumen (pengumuman resmi, laporan peristiwa tertulis, artikel-artikel baru yang muncul dari media massa) yang berkaitan

---

<sup>16</sup> Moleong, L. (2000). *metodologi penelitian kualitatif*. bandung: remaja rosdakarya.



dengan masalah-masalah penelitian atau untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.

### 3. Observasi

Observasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "melihat" dan "memperhatikan". Observasi atau Pengamatan adalah suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk melanjutkan suatu penelitian. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

#### **I.7.5. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian pada dasarnya adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur tersebut biasa disebut dengan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang dipakai untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Semua fenomena dalam penelitian secara spesifik disebut variabel penelitian.

- a) Peneliti adalah instrument utama dalam sebuah penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya.



- b) Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai objek penelitian dari para responden.
- c) Buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat berbagai data yang diperoleh di lokasi penelitian

### **I.7.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus tahu pasti, macam analisis data mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik ataukah non-statistik. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga diperlukan suatu proses penyederhanaan data, agar data-data yang telah diperoleh akan lebih mudah untuk dibicarakan dan diinterpretasikan. Dengan demikian akan diperoleh suatu data yang lebih akurat.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model (Miles dan Huberman, 1992, h.16-19), analisis ini disebut dengan analisis data model interaktif yang terdiri dari tiga tahap yaitu:

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung



terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Dalam melakukan reduksi data peneliti juga dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli untuk menambah wawasan dan pengembangan teori yang signifikan.

### 2. *Data display* (penyajian data)

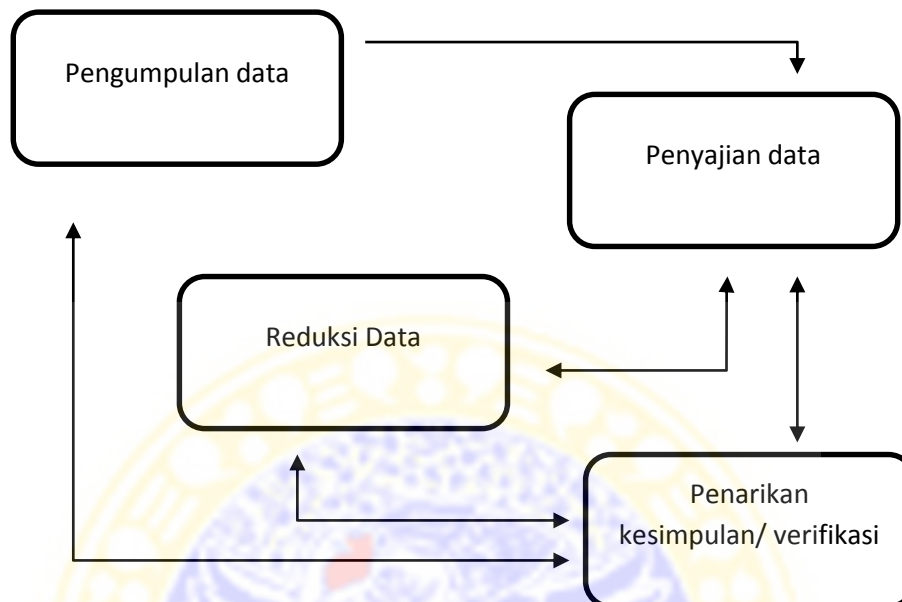
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Peneliti membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk tabel dan teks yang bersifat naratif yang merupakan penjelasan agar mempunyai makna yang bisa dipahami oleh orang lain.

### 3. *Verification*

Akhir dalam proses analisis adalah membuat kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan ini dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



**Gambar 3 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif**



Sumber : Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 1992, h.19

### I.7.7. Teknik Pengumpulan Informan

Informan merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian. karena dalam penelitian teknik pengumpulan informan akan menjadi awal mula data diperoleh. Menurut Lincoln dan Guba fungsi informan adalah membantu peneliti agar secepatnya dan dengan tetap seteliti mungkin untuk dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi<sup>17</sup> yang merupakan deskripsi tentang peristiwa sehari-hari.

Pemilihan informan secara bertujuan dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemilihan Informan tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu

<sup>17</sup> Moleong, L. (2000). *metodologi penelitian kualitatif*. bandung: remaja rosdakarya.



2. Pemilihan informan secara bertujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sample dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui
3. Penyesuaian berkelanjutan dari pemilihan informan yaitu pada mulanya setiap informan dapat sama kegunaannya. Namun sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja ternyata bahwa informan dipilih atas dasar fokus penelitian
4. Pemilihan terakhir jika sudah terjadi pengulangan yaitu pada informan secara bertujuan seperti ini jumlah informan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan jika maksudnya memperluas informasi, jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka pencarian informan dapat diakhiri jadi jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi maka pemilihan informan sudah harus dihentikan<sup>18</sup>

Peneliti telah menentukan pihak mana saja yang dapat dijadikan informan tentunya dengan bantuan informasi yang terbagi menjadi tiga kelompok:

- a) Sektor BUMN (PT. Semen Indonesia)
  1. Kepala Biro Kemitraan PT. Semen Indonesia  
Edy Wiyono
- b) Pelaku Usaha mikro kecil dan menengah  
Para pelaku yang menjadi informan Antara lain:
  - Achmad Irwan pengusaha kopiah unyil
  - Ibu Nurul pengusaha jasa kursus dan modes
- c) Instansi Pemerintah (Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik)
  - Bapak Hari Wahyudi, SE. MM. Seksi Kasi Fasilitas Permodalan UMKM
  - Ibu Endang Sulistyaningsih, SE Seksi Pembinaan Industri Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri

<sup>18</sup> Moleong, L. (2000). *metodologi penelitian kualitatif*. bandung: remaja rosdakarya.





## **BAB I: Pendahuluan**

---

- Bapak Sarbini, S.Sos Seksi Usaha Perdagangan di Bidang Perdagangan.

